B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Negara dipahami sebagai lembaga politik yang merupakan faktor instrumental atau manifestasi dari kebersamaan dan keberserikatan sekelompok manusia untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bersama (M. Din Syamsuddin, No. 2 Vol. 4, 1993: 5). Sebagai faktor instrumental dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, maka diperlukan konsep tentang negara. Sehingga diskursus tentang negara hampir tidak pernah berhenti, lebih-lebih di zaman modern ini. Dalam kenyataan kini, tidak seorang pun terbebas dari jari jemari negara. Kalau pun ada perbedaan, hanyalah pada kadar dan intensitasnya saja.

Islam sebagai agama yang komprehensip, dalam prinsip dasarnya mengatur segala aspek kehidupan manusia, yang mencakup akidah (sistem keyakinan), syari'ah (sistem hukum) dan akhlak (sistem etika) dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara (Suyuthi Pulungan, 1994: 1). Dalam melaksanakan atau memberlakukan aspek-aspek tersebut perlu adanya kekuasaan (tauliyah) untuk menerapkannya, ini tidak akan sempurna bila tanpa adanya negara (Saparlan, 1993: 4). Sehingga negara dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsepsi Islam bukan hanya sekedar alat bagi pencapaian kebaikan, kesejahteraan dan ketahanan, tetapi negara harus pula dapat menjamin pemberlakuan hukum Islam. Dengan demikian Islam dalam konsepsi dasar siyasah syar'iyahnya mengisyaratkan, bahwa adanya negara adalah suatu keharusan yang mempunyai arti dan peran sangat penting, bahkan sangat sentral. Sebagaimana firman Allah:

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ... (المائدة : ٣)

"Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku cukupkan kepada nikmat-Ku, dan telah Ku ridhai Islam itu jadi agama bagimu." (Departemen Agama R.I. 1979: 157)

مافرطنا فى الكتاب من شيئ ثم الى ربهم يحشرون. (الانعام: ٣٨)

"Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan." (Departemen Agama R.I. 1979: 192)

يا ايهاالذين امنوااطيعوا الله واطيعواالرسول واولى الامر منكم ... (النساء: ٥٩)

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." (Departemen Agama R.I. 1979: 128)

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن المنكر.واولئك هم المفلحون. (ال عمران : ١٠٤)

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung." (Departemen Agama R.I. 1979: 93).

Konsep negara dalam Islam (syara') sengaja tidak diatur secara rinci dan teknis, karena untuk memberi peluang dan kewenangan kepada manusia untuk menggunakan penalarannya agar dapat mengembangkan prinsip-prinsip umum tentang kemasyarakatan yang diatur dalam al-Quran dan sunnah Rasul - termasuk di dalamnya masalah kenegaraan - sesuai dengan tingkat kemajuan manusia, kebutuhannya dan masalah yang dihadapinya menurut tempat dan waktu (Muhammad Thahir Azhari, 1992: 5) sehingga pemikiran politik Islam, sebagai upaya pencarian landasan intelektual bagi fungsi dan peranan negara adalah merupakan ijtihad politik dalam rangka menemukan nilai-nilai Islam dalam konteks politik yang sedang berlangsung.

Memahami arti penting negara dan dengan mempertimbangkan hukum syara' yang bersifat universal, maka para fuqaha' membagi dunia ini ke dalam dua kategori, yaitu: Dar al-Islam (negeri damai) dan Dar al-Harb (negeri perang) (Abdel Wahab El-Affendi, 1994: 66). Dalam perkembangannya di samping kedua istilah tersebut, sebagian ulama menambahkan kategori negara ketiga yang dinamakan Dar al-Ahdi - dinamakan juga Dar al-Wasth

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(negara netral) (Saparlan, 1993: 5). Dar al-Ahdi adalah negara non-Muslim yang sedang terikat janji perdamaian dengan negara Islam (Ibrahim Hosen, No. 2 Vol. IV, 1993: 63).

Adapun negara yang masuk dalam kategori Dar al-Islam adalah negara yang di dalamnya nampak segala hukum Islam, atau penduduknya yang Muslim dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan syari'at Islam. Sedangkan yang masuk dalam kategori Dar al-Harb adalah segala negara yang bukan Islam atau negeri yang padanya tidak nampak hukum Islam (Hasby ash-Shiddieqy, Cet. I, 1970: 17-18). Dari sini, maka konsep negara Islam adalah negara yang mempunyai kekuasaan menerapkan, memberlakukan hukum Islam untuk semua umat baik Muslim maupun non-Muslim, karena pada dasarnya syari'ah Islam bukan syari'ah kedaerahan melainkan universal (Saparlan, 1993: 4) yang tidak dibedakan pada batas-batas etnis, agama dan kebangsaan melainkan keimanan mereka kepada Islam dan mereka menganggap diri mereka sebagai satu bangsa karena persamaan ideologi (Mumtaz Ahmad, ed., 1993: 60). Sehingga Abu A'la al-Maududi (1990: 166) menyatakan, bahwa pembagian dunia ke dalam dua kutub yang kelihatan bertolak belakang tersebut, dikarenakan oleh karakteristik Negara Islam sebagai negara ideologis.

Hal ini sehingga menjadi penting untuk dianalisa,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena sebagaimana yang diungkapkan oleh Maulana Muhammad Ali yang dikutip oleh Akhmad Minhaji (No.2, Vol.V, 1994: 25), bahwa istilah Dar al-Islam dan Dar al-Harb tidak pernah digunakan baik oleh al-Quran maupun al-Hadits. Di samping menurut kaidah hukum internasional - pembentukan negara baru haruslah mendapat pengakuan dari masyarakat internasional, batas-batas wilayahnya harus jelas dan dapat dijamin oleh konvensi internasional dari gangguan perbatasan (F. Isjwara, 1978: 95).

Lebih dari itu, negara-negara modern saat ini didirikan atas dasar etnisitas, kultur, bahasa serta wilayah di atas konsep nasionalisme yang pluralis. Cita-cita nasionalisme untuk berjuang mewujudkan perbedaan di antara bangsa-bangsa yang meliputi perjuangan untuk memperoleh kehormatan, kewibawaan gengsi dan pengaruh merupakan cita-cita yang paling kuat (F. Isjwara, 1978: 126). Dan wujud nyata umat Islam saat ini, adalah hidup dan berada dalam negara yang pluralisme, yang lebih mengutamakan kebangsaan dibandingkan dengan persaudaraan Islam, yang tunduk di bawah konvensi-konvensi internasional di samping tiap-tiap negara memiliki persoalan dan kebijaksanaan sendiri - sehingga mengakibatkan pluralisme politik di kalangan umat Islam. Konsep ini jelas tidak selaras dengan teori dan kultur politik Islam pra-modern (Azyumardi Azra, No.2, Vol.IV,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1993: 12).

Z.A. Ahmad sendiri (1952: 17) dalam bukunya "Konsepsi Negara Islam" menyatakan bahwa perkataan Dar al-Islam tidak termaktub dalam al-Quran dan tidak pula di dalam Hadits Nabi, tetapi lahirnya di dalam pengakuan ahli-ahli hukum Islam, di dalam ilmu fiqh (jurisprudentie). Itulah yang menjadikan krisis dan perdebatan hebat di kalangan pemikir dan penguasa Muslim atas perbenturan dengan kekuatan politik dan militer Eropa, yang menerus menanjak sejak akhir abad XVIII, dan tentang konsep-konsep Barat, seperti: Nation-States (Negara Kebangsaan), Nasionalisme, Kedaulatan dan semacamnya (Azyumardi Azra, No.2, Vol.IV, 1993: 11).

Menyimak persoalan ini, barangkali benar pendapat Abdel Wahab al-Affendi (1994: 3), bahwa wacana mutakhir aspek-aspek politik Islam membelah umat menjadi dua kubu yang berpikir jernih dan kubu yang beremosi tulus. Umat Islam yang beremosi tulus, terlalu berhati-hati memandang warisan politik Islam. Mereka cenderung memperlakukannya sebagai sesuatu yang sakral. Sementara mereka yang berpikir jernih tidak begitu saja menerima tersebut. Di bawah sinar al-Quran dan Sunnah Nabi, mereka mencoba mengkaji kembali untuk dapat diterapkan dengan tepat pada masa ini. Sehingga, dalam kehidupan berpolitik dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bernegara, kita dapat memilih dan menentukan kriteria manakah yang paling membawa kemaslahatan bagi umat.

Sementara, upaya mengakhiri perangkat emosi itu sudah menjadi kebutuhan mutlak. Umat Islam sekarang harus mengkritisi warisan Islam, tanpa meninggalkan komitmen mutlak pada identitas yang telah membentuknya. Namun, pada saat yang sama tidak memenjarakan diri dalam kelemahan-kelemahannya, juga tidak memperlakukannya sebagai sesuatu yang suci.

Untuk menjawab persoalan ini patut kita angkat kembali, mengingat pluralisme bangsa dan negara dengan pandangan hidup, norma hukum dan norma susila serta pola hubungan antar warga bahkan antar bangsa yang berbeda satu sama lain dewasa ini tidak dapat dipungkiri lagi kenyataannya, bahkan harus pula diakui ketika konsep-konsep yang berasal dari Barat berpengaruh bahkan dipraktekkan di lingkungan masyarakat Muslim. Pluralisme bangsa dan teritorial jelas diterima Islam, akan tetapi pluralisme politik dalam kerangka modern perlu kita kaji lebih jauh.

Akhirnya, urgensi dan esensi kajian tentang masalah di atas semakin terasa, utamanya bila diadakan studi dan kajian terhadap penerapan konsep Dar al-Islam dan Dar al-Harb dalam tata politik negara modern dan juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di dalam kepustakaan belum dijumpai hasil penelitian secara khusus tentang masalah ini.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka beberapa masalah yang dapat diiventarisasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sesungguhnya ruang lingkup hukum Islam?
2. Apakah dalam hukum Islam terdapat aspek-aspek publik - termasuk di dalamnya hukum tata negara?
3. Sehubungan dengan butir (2) dua, bagaimana konsep negara menurut hukum Islam?
4. Bagaimana konsep Dar al-Islam dan Dar al-Harb?
5. Bagaimana tata politik modern dewasa ini?
6. Bagaimana penerapan konsep Dar al-Islam dan Dar al-Harb dalam tata politik negara modern?
7. Adakah relevansi konsep Dar al-Islam dan Dar al-Harb dengan tata politik negara modern?
8. Bagaimana penerapan konsep Dar al-Islam dan Dar al-Harb dalam kaitannya dengan tata politik negara modern?
9. Bagaimana kedudukan dan peran ijtihad dalam pemikiran negara dipandang dari sudut hukum Islam?

Dari beberapa masalah di atas - dan masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak lagi - maka dapat diidentifikasikan masalah yang akan diteliti, yakni: penerapan konsep Dar al-Islam dan Dar al-Harb dalam tata politik negara modern menurut hukum Islam.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat rumusan masalah di atas masih bersifat umum dan sangat luas cakupannya, maka penelitian yang direncanakan ini akan membatasi dari konsep Dar al-Islam dan Dar al-Harb tentang negara universal. Maka rumusan masalahnya menjadi: bagaimana penerapan konsep Dar al-Islam dan Dar al-Harb tentang negara universal dalam tata politik negara modern yang dianalisis menurut hukum (kenegaraan) Islam?

D. Perumusan Masalah

Agar pembatasan masalah ini lebih praktis dan konsepsional, maka studi ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan konsep Dar al-Islam dan Dar al-Harb tentang negara universal dalam tata politik negara modern?
2. Bagaimana analisa hukum (kenegaraan) Islam terhadap penerapan konsep Dar al-Islam dan Dar al-Harb tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara universal dalam tata politik negara modern?

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, maka tujuan studi dalam pembahasan ini adalah:

1. Secara praktis untuk memenuhi persyaratan mahasiswa menempuh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) di Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel.
2. Secara teoritis:
   a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep Dar al-Islam dan Dar al-Harb tentang negara universal dalam tata politik negara modern.
   b. Untuk menetapkan bagaimana pandangan hukum (kenegaraan) Islam terhadap penerapan konsep Dar al-Islam dan Dar-al-Harb tentang negara universal dalam tata politik negara modern.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi yang akan dilakukan ini diharapkan bernilai dan bermanfaat minimal untuk hal-hal berikut:

1. Dapat digunakan sebagai bahan bahasan karya ilmiah lebih lanjut yang berbentuk skripsi.
2. Menambah wacanan pengetahuan di sekitar masalah politik, khususnya politik Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mengetahui bagaimana analisa hukum (kenegaraan) Islam terhadap penerapan konsep Dar al-Islam dan Dar al-Harb tentang negara universal dalam tata politik negara modern.

G. Metodologi

Dalam pembahasan ini diperlukan adanya fase-fase tertentu yang bersifat integral dengan memperhatikan aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, sehingga berbagai indikasi dan identifikasi akan menempati proporsi secara lebih representatif.

1. Data yang diperlukan
   a. Pendapat tentang pengertian Dar al-Islam dan Dar al-Harb serta negara modern.
   b. Pendapat tentang pola penerapan konsep Dar al-Islam dan Dar al-Harb, pola hubungan di antara negara modern dewasa ini.

2. Sumber data

Dari data-data global yang tergambar di atas, sumber datanya adalah bahan-bahan kepustakaan, bersumber pada literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah tersebut di atas.

Adapun sumber data buku-buku yang digunakan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulisan skripsi ini, di antaranya adalah:

a. Prof. T.M. Hasbi as-Shiddieqy, Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh dan Ideologi.
b. ----------, Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqh Islam.
c. Abu A'la Al-Maududi, Sistem Politik Islam.
d. Imam Abi Abd. Allah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhori, Shahih Al-Bukhari
e. H. Z. Abidin Ahmad, Konsepsi Politik dan Ideologi Islam.
f. Huala Adolf S.H., Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional.
g. Drs. Saparlan, Fiqh Siyasah II (dauly)
h. Dan lain-lain.

3. Teknik penggalian data

Sesuai dengan macam penelitiannya, yaitu *libraly research* maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku, surat kabar sebagai sumber data yang relevan dengan sumber data ini.

Adapun teknik penggalian datanya adalah dengan cara mencari pendapat para ulama dan sarjana serta landasannya, kemudian dari data tersebut dianalisa dalam rangka untuk mencari kesimpulan.

4. Metode analisa data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, akan dianalisa secara kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kevaliditasan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan lainnya, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.
b. Pengorganisasian data, yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang diperoleh dalam paparan yang sudah direncanakan sebelumnya.
c. Penemuan hasil, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil dan sebagainya.

Selanjutnya dianalisa sebagai berikut:

a. Metode deduktif, yaitu menjelaskan hal-hal yang bersifat umum untuk dibawa kepada hal-hal yang bersifat khusus.
b. Metode komparatif, yaitu menganalisa data-data yang berbeda dengan jalan membandingkan untuk mengetahui mana yang lebih kuat, kemudian diambil kesimpulan dan sebagai landasan untuk menentukan pendirian lebih lanjut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id